e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

Analysis Of Factors Determining The Welfare Scores Of Families Receiving Pkh: A Case Study Of Simpang Dolok Village, Datuk Lima Puluh District, Batu Bara Regency

Analisis Faktor-Faktor Penentu Skor Kesejahteraan Keluarga Penerima Pkh: Studi Kasus Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara

Ade Maharani Sitorus [1)]; Annisa Ilmi Faried [2*)]; Uswatun Hasanah [3)]
[1,2,3)] Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: [1)] sademaharanisitorus@gmail.com

ARTICLE HISTORY
Received [02 April 2026]
Revised [08 Mei 2026]
Accepted [11 Mei 2026]

KEYWORDS
Family Welfare, Family Hope Program, DTSEN.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi skor kesejahteraan keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Meskipun PKH telah dilaksanakan untuk mengurangi kemiskinan, variasi tingkat kesejahteraan di antara keluarga penerima masih terjadi. Penelitian ini menggunakan data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) periode Januari 2025 dengan pendekatan sensus terhadap 94 keluarga penerima PKH. Variabel yang dianalisis mencakup karakteristik demografi kepala rumah tangga, karakteristik keluarga, kondisi ekonomi rumah tangga, kondisi perumahan, dan akses layanan dasar. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga, luas lahan yang dikuasai, kepemilikan ternak, luas lantai rumah, kualitas material bangunan, dan kondisi akses jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kesejahteraan DTSEN. Sebaliknya, jumlah anggota keluarga, rasio ketergantungan, dan jarak ke fasilitas kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga penerima PKH tidak hanya bergantung pada bantuan tunai, tetapi juga pada peningkatan modal manusia, kepemilikan aset produktif, perbaikan kualitas perumahan, dan akses terhadap layanan dasar.

ABSTRACT
This study aims to analyze the factors that influence the welfare score of Family Hope Program (PKH) recipient families in Simpang Dolok Village, Datuk Lima Puluh District, Batu Bara Regency. Despite PKH implementation to reduce poverty, variations in welfare levels among recipient families persist. This research utilizes Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) from January 2025 period with a census approach covering all 94 PKH recipient families. Variables analyzed include household head demographic characteristics, family characteristics, household economic conditions, housing conditions, and access to basic services. Multiple linear regression with Ordinary Least Squares (OLS) method was employed for data analysis. The results show that education level of household head, land area controlled, livestock ownership, house floor area, building material quality, and road access conditions have positive and significant effects on DTSEN welfare score. Conversely, number of family members, dependency ratio, and distance to health facilities have negative and significant effects. These findings indicate that improving the welfare of PKH recipient families depends not only on cash transfers but also on enhancing human capital, productive asset ownership, housing quality improvement, and access to basic services.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama pembangunan di Indonesia meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin Indonesia menurun dari 10,19% pada tahun 2020 menjadi 9,03% pada tahun 2024. Namun demikian, capaian tersebut masih belum memenuhi target pembangunan nasional, serta menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah (BPS, 2024). Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Batu Bara tercatat sebesar 11,84%, lebih tinggi dari rata-rata nasional (9,03%) dan provinsi Sumatera Utara (8,83%). Lebih memprihatinkan lagi, jumlah absolut penduduk miskin relatif stagnan dalam lima tahun terakhir, yaitu berkisar 49.560–50.820 jiwa, mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan belum memberikan hasil yang optimal (Kajian DPRD Kabupaten Batu Bara, 2025).

Data menunjukkan bahwa jumlah KPM PKH di Kabupaten Batu Bara mengalami peningkatan signifikan dari 7.245 keluarga pada tahun 2020 menjadi 8.742 keluarga pada tahun 2024, atau meningkat 20,7%. Coverage ratio PKH terhadap keluarga miskin juga meningkat dari 56,8% pada tahun 2020

menjadi 70,2% pada tahun 2024, mengindikasikan perbaikan dalam ketepatan sasaran program. Total anggaran yang disalurkan juga meningkat signifikan dari Rp 18,45 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 31,47 miliar pada tahun 2024, atau meningkat 70,6%. Bantuan rata-rata per KPM per tahun juga mengalami kenaikan dari Rp 2,55 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 3,60 juta pada tahun 2024. Sebagai salah satu instrumen utama perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) berperan penting dalam membantu keluarga miskin melalui bantuan sosial bersyarat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Implementasi PKH di Kabupaten Batu Bara menunjukkan peningkatan jumlah penerima dari 7.245 keluarga pada tahun 2020 menjadi 8.742 keluarga pada tahun 2024, dengan alokasi anggaran meningkat dari Rp 18,45 miliar menjadi Rp 31,47 miliar. Meskipun jumlah penerima dan anggaran PKH terus meningkat, kondisi kesejahteraan keluarga penerima manfaat belum menunjukkan perbaikan yang merata (Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara, 2024). Berdasarkan data DTSEN Kabupaten Batu Bara periode Januari 2025, mayoritas keluarga penerima PKH masih berada pada kelompok kesejahteraan terendah, dengan 52,3% berada pada desil 1 (sangat miskin), 28,7% pada desil 2 (miskin), 14,2% pada desil 3 (hampir miskin), dan 4,8% pada desil 4 (rentan miskin). Data pemutakhiran DTSEN juga menunjukkan adanya mobilitas kesejahteraan, di mana sebanyak 1.248 keluarga (14,3%) mengalami kenaikan desil, sementara 952 keluarga (10,9%) justru mengalami penurunan desil dalam periode satu tahun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar bantuan PKH yang memengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga (Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi skor kesejahteraan DTSEN keluarga penerima PKH di Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Pemahaman terhadap determinan kesejahteraan keluarga penerima PKH sangat penting untuk merancang intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.

LANDASAN TEORI

Karakteristik Demografi Kepala Rumah Tangga dan Teori Modal Manusia

Variabel karakteristik demografi kepala rumah tangga yang mencakup usia, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin dijelaskan melalui Teori Modal Manusia. Teori ini menempatkan individu sebagai aset produktif, di mana investasi dalam pendidikan dan pengalaman kerja meningkatkan kapasitas ekonomi serta kemampuan pengambilan keputusan rumah tangga. Dalam konteks keluarga penerima PKH, perbedaan kualitas modal manusia kepala rumah tangga berimplikasi pada kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang terbatas, sehingga memengaruhi skor kesejahteraan yang tercermin dalam DTSEN.

Karakteristik Keluarga dan Teori Struktur Keluarga

Pengaruh jumlah anggota keluarga dan rasio ketergantungan dianalisis dengan menggunakan Teori Struktur Keluarga. Teori ini memandang keluarga sebagai unit ekonomi dengan fungsi produksi, konsumsi, dan distribusi sumber daya. Struktur keluarga yang memiliki proporsi anggota tidak produktif yang tinggi cenderung menghadapi beban ekonomi yang lebih besar, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan per kapita. Oleh karena itu, variasi struktur keluarga menjadi faktor penting dalam menjelaskan perbedaan skor kesejahteraan keluarga penerima PKH.

Kondisi Ekonomi Rumah Tangga dan Sustainable Livelihood Framework

Variabel kondisi ekonomi rumah tangga, yang meliputi status pekerjaan, pendapatan, dan kepemilikan aset, dijelaskan melalui *Sustainable Livelihood Framework*. Kerangka ini menekankan bahwa kesejahteraan ditentukan oleh kemampuan rumah tangga dalam mengakses dan memanfaatkan aset produktif untuk mempertahankan penghidupan. Dalam penelitian ini, pekerjaan dan pendapatan merepresentasikan sumber penghidupan utama, sementara kepemilikan aset mencerminkan kapasitas rumah tangga dalam menghadapi kerentanan ekonomi. Perbedaan akses terhadap aset tersebut berkontribusi pada variasi skor kesejahteraan DTSEN di antara keluarga penerima PKH.

Kondisi Perumahan sebagai Representasi Aset Kesejahteraan

Kondisi perumahan dipahami sebagai bentuk akumulasi aset jangka panjang yang mencerminkan stabilitas ekonomi rumah tangga. Kualitas hunian dan kepemilikan rumah tidak hanya menunjukkan kemampuan ekonomi, tetapi juga memengaruhi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan hidup keluarga. Oleh karena itu, kondisi perumahan menjadi salah satu determinan penting dalam menjelaskan perbedaan skor kesejahteraan keluarga penerima PKH di Desa Simpang Dolok.

e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

Akses Layanan Dasar dan Teori Modal Sosial

Akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan layanan kesehatan dianalisis menggunakan Teori Modal Sosial. Akses yang memadai terhadap layanan publik mencerminkan keterhubungan rumah tangga dengan sistem sosial dan kelembagaan di sekitarnya. Rumah tangga yang memiliki akses lebih baik terhadap layanan dasar cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi, tingkat kerentanan yang lebih rendah, serta peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Sintesis Kerangka Analisis

Secara konseptual, penelitian ini memandang skor kesejahteraan keluarga penerima PKH sebagai hasil interaksi antara modal manusia, struktur keluarga, aset ekonomi, kondisi perumahan, dan akses layanan dasar. Setiap dimensi memiliki dasar teoretis yang saling melengkapi dan relevan untuk menjelaskan variasi kesejahteraan keluarga penerima PKH di Desa Simpang Dolok. Dengan demikian, penggunaan kerangka teori terpadu ini memberikan justifikasi ilmiah yang kuat terhadap pemilihan variabel dan pendekatan analisis dalam penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian dilaksanakan di Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, pada periode Februari hingga Mei 2026.

Gambar 1. Kerangka Metode Penelitian, 2026

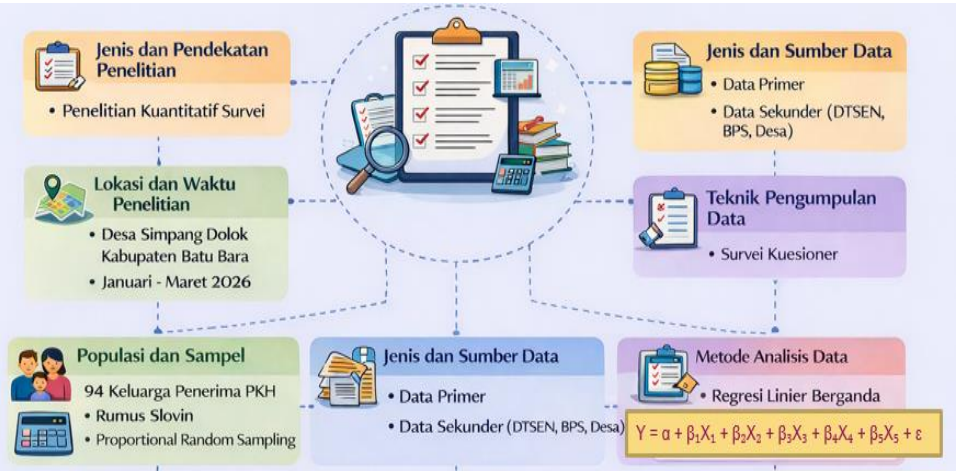

Populasi penelitian adalah seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yang terdaftar dalam DTSEN periode Januari 2025 di Desa Simpang Dolok, berjumlah 94 keluarga. Mengingat jumlah populasi yang relatif terbatas, penelitian ini menggunakan metode sensus atau sampel jenuh (total sampling), di mana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Penggunaan sensus memberikan representasi yang sempurna terhadap seluruh KPM PKH di lokasi penelitian dan menghilangkan sampling error. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) periode Januari 2025 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah skor kesejahteraan DTSEN yang bersifat numerik dan kontinu. Variabel independen dikelompokkan menjadi lima dimensi: (1) Karakteristik demografi kepala rumah tangga (usia, pendidikan, jenis kelamin); (2) Karakteristik keluarga (jumlah anggota keluarga, rasio ketergantungan); (3) Kondisi ekonomi rumah tangga (status pekerjaan, luas lahan, kepemilikan ternak); (4) Kondisi perumahan (luas lantai rumah, indeks kualitas material bangunan); (5) Akses layanan dasar (jarak ke fasilitas kesehatan, kondisi akses jalan). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial menggunakan regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan

melalui uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen dan uji F untuk menguji pengaruh simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian yang telah dikembangkan, model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Di mana:

- Y = Skor Kesejahteraan DTSEN
- α = Konstanta (intercept)
- $\beta_1, \beta_2, ..., \beta_{12}$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- X_1 = Karakteristik Demografi Kepala Rumah Tangga
- X_2 = Karakteristik Keluarga
- X_3 = Kondisi Ekonomi Rumah Tangga
- X_4 = Kondisi Perumahan
- X_5 = Akses Layanan Dasar dan Infrastruktur
- ε = Error term

Model regresi di atas menjelaskan bahwa skor kesejahteraan DTSEN (Y) dipengaruhi oleh 12 variabel independen yang dikelompokkan dalam lima dimensi: karakteristik demografi kepala rumah tangga (X_1), karakteristik keluarga (X_2), kondisi ekonomi rumah tangga (X_3), kondisi perumahan (X_4), dan akses layanan dasar serta infrastruktur (X_5). Konstanta α merepresentasikan nilai Y ketika semua variabel independen bernilai nol, koefisien β menunjukkan besarnya perubahan Y akibat perubahan satu satuan X dengan variabel lain konstan (ceteris paribus), dan ε adalah error term yang menangkap variasi Y yang tidak dapat dijelaskan oleh model (Gujarati & Porter, 2009; Hair et al., 2019). Penelitian ini menggunakan **data primer dan data sekunder**. Data primer diperoleh melalui **survei kuesioner terstruktur** yang diberikan kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Simpang Dolok. Kuesioner disusun berdasarkan variabel penelitian untuk memperoleh data kuantitatif yang seragam dan mudah dianalisis secara statistik. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang bersumber dari **Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)**, publikasi **Badan Pusat Statistik (BPS)**, serta data administrasi pemerintah desa. Data ini dimanfaatkan untuk melengkapi informasi lapangan dan memperkuat validitas analisis. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui koordinasi dengan pihak desa dan pendamping PKH, pelaksanaan survei kepada responden terpilih, serta pemeriksaan kelengkapan data sebelum tahap pengolahan dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskripsi Karakteristik Demografi Kepala Rumah Tangga

Karakteristik demografi kepala rumah tangga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kapasitas produktif dan kemampuan pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga (Todaro & Smith, 2020). Dalam penelitian ini, karakteristik demografi mencakup usia, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin kepala rumah tangga.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Usia Kepala Rumah Tangga

Statistik	Nilai (Tahun)
Mean	45,68
Median	44,00
Std. Deviation	11,24
Minimum	24
Maximum	72
N	94

Usia rata-rata kepala rumah tangga adalah 45,68 tahun dengan standar deviasi 11,24 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar KRT berada pada fase produktif pertengahan (*middle productive age*) menurut teori *life cycle hypothesis* (Modigliani & Brumberg, 1954). Usia termuda adalah 24 tahun dan tertua 72 tahun, mencerminkan heterogenitas fase kehidupan ekonomi di antara KPM PKH (Ravallion & Wodon, 1999).

e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

Tabel 2 Distribusi Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	18	19,1
Tamat SD	38	40,4
Tamat SMP	24	25,5
Tamat SMA	12	12,8
Perguruan Tinggi	2	2,1
Total	**94**	**100,0**

Sumber: Data DTSEN diolah, 2026

Distribusi pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas KRT memiliki pendidikan rendah, dengan 59,5% hanya tamat SD atau di bawahnya (Tabel 2). Hanya 14,9% yang memiliki pendidikan SMA ke atas, mencerminkan rendahnya akumulasi modal manusia (*human capital*) yang berkontribusi terhadap kemiskinan persisten (Becker, 1993; Schultz, 1961). Temuan ini sejalan dengan penelitian Duflo (2001) yang menemukan bahwa rendahnya pendidikan kepala rumah tangga merupakan salah satu prediktor terkuat kemiskinan di Indonesia.

Tabel 3 Distribusi Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	71	75,5
Perempuan	23	24,5
Total	**94**	**100,0**

Sebanyak 75,5% rumah tangga dikepalai oleh laki-laki dan 24,5% oleh perempuan (Tabel 3). Proporsi *female-headed households* sebesar 24,5% lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 15-18%, mengindikasikan kerentanan khusus yang dihadapi oleh rumah tangga yang dikepalai perempuan dalam konteks kemiskinan (Buvinic & Gupta, 1997; Chant, 2008).

Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018).

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Test Statistic	Unstandardized Residual
N	94
Kolmogorov-Smirnov Z	0,078
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05, yang berarti residual berdistribusi normal (Tabel 4.21). Hasil ini diperkuat oleh analisis grafik Normal P-P Plot yang menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, mengindikasikan distribusi residual yang mendekati normal (Field, 2018). Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut (Hair et al., 2019).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi (Gujarati & Porter, 2019).

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Usia KRT	0,682	1,466	Tidak ada multikolinearitas
Pendidikan KRT	0,594	1,684	Tidak ada multikolinearitas
Jenis Kelamin KRT	0,823	1,215	Tidak ada multikolinearitas
Jumlah Anggota RT	0,458	2,183	Tidak ada multikolinearitas
Rasio Ketergantungan	0,512	1,953	Tidak ada multikolinearitas
Status Pekerjaan	0,637	1,570	Tidak ada multikolinearitas
Jenis Pekerjaan	0,589	1,698	Tidak ada multikolinearitas

Kepemilikan Lahan	0,712	1,404	Tidak ada multikolinearitas
Luas Lahan	0,654	1,529	Tidak ada multikolinearitas
Kepemilikan Ternak	0,748	1,337	Tidak ada multikolinearitas
Luas Lantai Per Kapita	0,524	1,908	Tidak ada multikolinearitas
Jarak ke Faskes	0,692	1,445	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Output SPSS, 2026

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	Sig.	Keterangan
Usia KRT	0,234	Tidak ada heteroskedastisitas
Pendidikan KRT	0,187	Tidak ada heteroskedastisitas
Jenis Kelamin KRT	0,412	Tidak ada heteroskedastisitas
Jumlah Anggota RT	0,156	Tidak ada heteroskedastisitas
Rasio Ketergantungan	0,289	Tidak ada heteroskedastisitas
Status Pekerjaan	0,324	Tidak ada heteroskedastisitas
Jenis Pekerjaan	0,198	Tidak ada heteroskedastisitas
Kepemilikan Lahan	0,267	Tidak ada heteroskedastisitas
Luas Lahan	0,145	Tidak ada heteroskedastisitas
Kepemilikan Ternak	0,356	Tidak ada heteroskedastisitas
Luas Lantai Per Kapita	0,223	Tidak ada heteroskedastisitas
Jarak ke Faskes	0,401	Tidak ada heteroskedastisitas

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Regresi Linear Berganda (Coefficients)[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
(Constant)	8,245	2,134		3,864	0,000		
Usia KRT	0,048	0,032	0,112	1,500	0,138	0,682	1,466
Pendidikan KRT	1,156	0,324	0,268	3,568	0,001	0,594	1,684
Jenis Kelamin KRT	-1,234	0,542	-0,162	-2,276	0,026	0,823	1,215
Jumlah Anggota RT	-0,682	0,214	-0,238	-3,187	0,002	0,458	2,183
Rasio Ketergantungan	-1,524	0,648	-0,133	-2,352	0,021	0,512	1,953
Status Pekerjaan	2,148	0,876	0,176	2,452	0,016	0,637	1,570
Jenis Pekerjaan	0,845	0,412	0,152	2,051	0,044	0,589	1,698
Kepemilikan Lahan	1,423	0,568	0,186	2,505	0,014	0,712	1,404
Luas Lahan	0,0008	0,0003	0,198	2,667	0,009	0,654	1,529
Kepemilikan Ternak	1,287	0,524	0,168	2,456	0,016	0,748	1,337
Luas Lantai Per Kapita	0,324	0,098	0,288	3,306	0,001	0,524	1,908
Jarak ke Faskes	-0,456	0,187	-0,172	-2,439	0,017	0,692	1,445

a. Dependent Variable: Skor Kesejahteraan DTSEN

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 26, 2026

Koefisien Determinasi (R^2 dan Adjusted R^2)

Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	**0,826**	**0,683**	**0,636**	**2,914**

e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 9 Model Summary (Koefisien Determinasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,826[a]	0,683	0,636	2,914	1,876

a. Predictors: (Constant), Jarak ke Faskes, Kepemilikan Ternak, Jenis Kelamin KRT, Usia KRT, Kepemilikan Lahan, Jenis Pekerjaan, Status Pekerjaan, Rasio Ketergantungan, Luas Lahan, Pendidikan KRT, Luas Lantai Per Kapita, Jumlah Anggota RT
b. Dependent Variable: Skor Kesejahteraan DTSEN
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 26, 2026

Pembahasan

Pembahasan Rumusan Masalah 1: Pengaruh Karakteristik Demografi Kepala Rumah Tanggaterhadap Skor Kesejahteraan DTSEN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator karakteristik demografi kepala rumah tangga, dua variabel berpengaruh signifikan terhadap skor kesejahteraan DTSEN, yaitu pendidikan KRT (berpengaruh positif) dan jenis kelamin KRT (berpengaruh negatif), sementara usia KRT tidak berpengaruh signifikan. Pengaruh signifikan pendidikan KRT terhadap kesejahteraan sangat konsisten dengan landasan teoretis *human capital theory* yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi dalam modal manusia yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan (Becker, 1993; Schultz, 1961). Sen (1999) juga menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu kapabilitas fundamental yang memungkinkan individu untuk mencapai *functionings* yang mereka nilai dalam kehidupan. Dalam konteks empiris, temuan ini sejalan dengan penelitian Suryahadi dan Sumarto (2021) yang menemukan bahwa pendidikan KRT merupakan determinan terkuat kesejahteraan rumah tangga penerima PKH di Indonesia.

Mekanisme pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan adalah multifaset: (1) meningkatkan akses terhadap pekerjaan berkualitas dan berpenghasilan lebih tinggi; (2) meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi dan manajemen usaha; (3) meningkatkan kapasitas dalam pengambilan keputusan ekonomi yang lebih rasional; dan (4) meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan anak (Todaro & Smith, 2020; Mincer, 1974). Dalam konteks Desa Simpang Dolok, rendahnya tingkat pendidikan KRT (59,5% hanya tamat SD atau di bawahnya) menjadi salah satu penghambat utama peningkatan kesejahteraan, meskipun mereka menerima bantuan PKH.

Pengaruh negatif signifikan jenis kelamin KRT (rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki kesejahteraan lebih rendah) konsisten dengan literatur tentang kerentanan *female-headed households* (Buvinic & Gupta, 1997; Chant, 2008). Penelitian Quisumbing dan Maluccio (2003) menjelaskan bahwa perempuan kepala rumah tangga menghadapi tantangan struktural seperti diskriminasi di pasar tenaga kerja, *gender wage gap*, beban ganda domestik dan produktif, serta akses terbatas terhadap aset produktif seperti lahan.

Dalam konteks Desa Simpang Dolok, sebagian besar rumah tangga yang dikepalai perempuan adalah janda atau ditinggal suami bekerja di luar daerah, dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan kepemilikan lahan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sensitif gender, sebagaimana ditekankan oleh Chant (2008) dan World Bank (2020). Program seperti PKH perlu dilengkapi dengan intervensi khusus untuk memberdayakan perempuan kepala rumah tangga, seperti pelatihan keterampilan, akses kredit mikro, dan dukungan pengasuhan anak.

Tidak signifikannya pengaruh usia KRT berbeda dengan hipotesis awal yang didasarkan pada *life cycle hypothesis* (Modigliani & Brumberg, 1954). Namun, temuan ini dapat dijelaskan oleh dua faktor: (1) Mayoritas KRT berada pada rentang usia produktif (rata-rata 45,68 tahun) sehingga variasi usia tidak cukup besar untuk menunjukkan perbedaan kesejahteraan yang signifikan; (2) Dalam konteks kemiskinan ekstrem, faktor-faktor struktural seperti pendidikan dan kepemilikan aset lebih dominan dibandingkan usia (Sen, 1999). Hasil ini konsisten dengan beberapa studi di negara berkembang yang menemukan bahwa pengaruh usia terhadap kesejahteraan bersifat kontekstual dan seringkali tidak linear (Ravallion & Wodon, 1999).

Pembahasan Rumusan Masalah 2: Pengaruh Karakteristik Keluarga terhadap Skor Kesejahteraan DTSEN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua indikator karakteristik keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap skor kesejahteraan DTSEN, yaitu jumlah anggota rumah tangga dan rasio ketergantungan.

Pengaruh negatif signifikan jumlah anggota rumah tangga sangat konsisten dengan teori *dilution effect* yang menyatakan bahwa penambahan anggota rumah tangga menyebabkan dilusi sumber daya per kapita (Lanjouw & Ravallion, 1995; Deaton & Paxson, 1998). Meskipun rumah tangga besar dapat

menikmati *economies of scale* dalam konsumsi barang-barang publik seperti perumahan, namun dalam konteks kemiskinan ekstrem, efek dilusi lebih dominan karena keterbatasan sumber daya ekonomi dan proporsi anggota produktif yang rendah (Lanjouw & Ravallion, 1995).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dartanto et al. (2022) yang menemukan bahwa ukuran rumah tangga berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan penerima PKH di Indonesia. Dalam konteks DTSEN, jumlah anggota rumah tangga berkontribusi pada beberapa dimensi kesejahteraan seperti ketersediaan sumber daya per kapita, *crowding* perumahan, dan kemampuan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan (Suryahadi et al., 2024). Rata-rata jumlah anggota rumah tangga KPM PKH di Desa Simpang Dolok sebesar 4,32 orang sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional (3,9 orang), mencerminkan pola fertilitas yang masih relatif tinggi di wilayah pedesaan (BPS, 2024).

Pengaruh negatif signifikan rasio ketergantungan mendukung teori *demographic dividend* yang menyatakan bahwa struktur usia produktif yang tinggi dan *dependency ratio* yang rendah memungkinkan akumulasi tabungan dan investasi yang lebih besar (Bloom & Williamson, 1998). Rasio ketergantungan tinggi berarti beban ekonomi yang lebih besar karena pendapatan dari anggota produktif harus dibagi untuk lebih banyak anggota non-produktif (World Bank, 2020).

Rata-rata rasio ketergantungan sebesar 0,68 di Desa Simpang Dolok lebih tinggi dari rata-rata nasional (0,51), mengindikasikan struktur demografi yang kurang menguntungkan untuk akumulasi kesejahteraan (BPS, 2024). Temuan ini konsisten dengan penelitian Suryahadi dan Sumarto (2021) yang menemukan bahwa rasio ketergantungan merupakan prediktor signifikan kemiskinan rumah tangga di Indonesia.

Dari perspektif kebijakan, temuan ini menggarisbawahi pentingnya program Keluarga Berencana (KB) dan investasi dalam modal manusia anak-anak untuk menciptakan *demographic dividend* di masa depan (Bloom & Williamson, 1998). Program PKH sebenarnya sudah mengandung elemen yang mendukung hal ini melalui kondisionalitas partisipasi sekolah dan akses kesehatan reproduksi, namun implementasi dan enforcement kondisionalitas perlu diperkuat (Fiszbein & Schady, 2009).

Pembahasan Rumusan Masalah 3: Pengaruh Kondisi Ekonomi Rumah Tangga terhadap Skor Kesejahteraan DTSEN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima indikator kondisi ekonomi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kesejahteraan DTSEN, yaitu status pekerjaan, jenis pekerjaan, kepemilikan lahan, luas lahan, dan kepemilikan ternak.

Pengaruh signifikan status pekerjaan sangat intuitif dan konsisten dengan literatur ekonomi ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan merupakan sumber pendapatan utama rumah tangga (Fields, 2011; ILO, 2018). Dalam konteks kemiskinan, keberadaan pekerjaan menjadi penentu fundamental kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluar dari jebakan kemiskinan (Sen, 1999). Fakta bahwa 12,8% KRT tidak bekerja menunjukkan kerentanan ekstrem yang memerlukan intervensi khusus seperti program padat karya atau bantuan modal usaha (Todaro & Smith, 2020).

Pengaruh signifikan jenis pekerjaan mendukung literatur tentang pentingnya *livelihood diversification* dari sektor pertanian ke non-pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kerentanan (Ellis, 2000; Barrett et al., 2001). Penelitian De Janvry dan Sadoulet (2001) menemukan bahwa diversifikasi pekerjaan non-pertanian merupakan strategi penting untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga pedesaan. Dominasi sektor pertanian (59,6%) dan pekerjaan informal (81,9%) di Desa Simpang Dolok mencerminkan keterbatasan peluang ekonomi non-pertanian yang menjadi penghambat struktural peningkatan kesejahteraan (Monografi Desa Simpang Dolok, 2025).

Pekerjaan formal cenderung memberikan pendapatan lebih stabil, akses terhadap jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan prospek karier yang lebih baik dibandingkan pekerjaan informal (ILO, 2018). Dalam konteks kebijakan, temuan ini menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja non-pertanian dan formalisasi pekerjaan informal melalui regulasi yang tepat dan insentif bagi pengusaha mikro dan kecil (World Bank, 2020).

Pengaruh signifikan kepemilikan dan luas lahan sangat konsisten dengan literatur ekonomi pertanian yang menekankan pentingnya lahan sebagai aset produktif fundamental di wilayah pedesaan agraris (Deininger & Feder, 2001; Besley, 1995). Lahan tidak hanya berfungsi sebagai faktor produksi tetapi juga sebagai jaminan ekonomi, sumber status sosial, dan *buffer* terhadap guncangan (Feder & Feeny, 1991). Kepemilikan lahan juga meningkatkan akses terhadap kredit karena dapat dijadikan agunan, serta memberikan insentif untuk investasi jangka panjang seperti perbaikan kualitas tanah dan irigasi (Besley, 1995).

Fakta bahwa hanya 40,4% KPM PKH yang memiliki lahan dan rata-rata luas hanya 0,12 ha (jauh di bawah luas ekonomis 0,5 ha) mencerminkan ketimpangan distribusi aset produktif yang menjadi penyebab kemiskinan struktural (De Janvry & Sadoulet, 2001). Fenomena *landless poverty* ini

menjelaskan mengapa banyak rumah tangga petani tetap miskin meskipun bekerja di sektor pertanian (Ellis, 2000). Temuan ini mendukung argumen pentingnya reforma agraria dan redistribusi lahan untuk mengatasi kemiskinan pedesaan secara struktural (World Bank, 2020).

Pengaruh signifikan kepemilikan ternak konsisten dengan konsep *living savings* dalam *sustainable livelihoods framework* (Ellis, 2000; Scoones, 1998). Ternak berfungsi sebagai tabungan hidup yang dapat dicairkan saat dibutuhkan (misalnya untuk biaya pengobatan atau pendidikan anak) dan sebagai sumber pendapatan tambahan (penjualan susu, telur, atau anak ternak). Dalam konteks rumah tangga miskin, kepemilikan ternak juga berfungsi sebagai mekanisme *coping strategy* saat menghadapi guncangan ekonomi seperti sakit atau musim paceklik (Barrett et al., 2001).

Fakta bahwa hanya 34,0% KPM PKH yang memiliki ternak mencerminkan keterbatasan aset produktif yang membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan dan sulit untuk keluar dari jebakan kemiskinan (*poverty trap*) (Carter & Barrett, 2006). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya program bantuan aset produktif seperti bantuan ternak atau modal usaha yang dapat melengkapi bantuan tunai PKH untuk dampak yang lebih berkelanjutan (Dartanto et al., 2022).

Secara keseluruhan, dominasi dimensi ekonomi (lima dari lima indikator signifikan) dalam menentukan kesejahteraan konsisten dengan teori *sustainable livelihoods* yang menekankan bahwa kombinasi berbagai jenis modal (financial, physical, natural) menentukan kapasitas rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan (DFID, 1999; Scoones, 1998). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Suryahadi et al. (2024) yang menemukan bahwa variabel-variabel ekonomi merupakan prediktor terkuat dalam model klasifikasi desil DTSEN.

Pembahasan Rumusan Masalah 4: Pengaruh Kondisi Perumahan terhadap Skor Kesejahteraan DTSEN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kondisi perumahan, yaitu luas lantai per kapita, berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kesejahteraan DTSEN, bahkan merupakan variabel dengan pengaruh paling dominan (beta = 0,288).

Temuan ini sangat konsisten dengan literatur tentang pentingnya kualitas perumahan terhadap kesejahteraan yang dikemukakan oleh UN-Habitat (2016) dan Galster (1987). Perumahan layak merupakan salah satu komponen fundamental dalam definisi kesejahteraan multidimensional, sebagaimana tercermin dalam *Multidimensional Poverty Index* yang mencakup dimensi standar hidup dengan indikator perumahan (Alkire & Foster, 2011).

Luas lantai per kapita mempengaruhi kesejahteraan melalui beberapa mekanisme: (1) **Kesehatan**: Kondisi *crowding* (kepadatan hunian tinggi) meningkatkan risiko penularan penyakit menular seperti tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit (Marsh et al., 2000; Currie & Yelowitz, 2000); (2) **Produktivitas**: Kualitas istirahat yang buruk akibat kepadatan hunian menurunkan produktivitas kerja dan kemampuan belajar anak (Galster, 1987); (3) **Kesejahteraan Psikologis**: Ketiadaan privasi dan ruang personal yang memadai berdampak negatif pada kesehatan mental dan harmoni keluarga (Marsh et al., 2000); (4) **Akumulasi Aset**: Rumah yang layak merupakan bentuk aset yang dapat meningkatkan akses terhadap kredit dan status sosial (Currie & Yelowitz, 2000).

Rata-rata luas lantai per kapita hanya 8,42 m², di bawah standar minimum WHO sebesar 10 m² per orang, mengindikasikan kondisi *overcrowding* yang dialami oleh sebagian besar KPM PKH di Desa Simpang Dolok. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa 25,5% rumah tangga masih memiliki lantai tanah dan 19,1% memiliki dinding bambu/kayu yang rentan terhadap cuaca ekstrem dan kerusakan (Tabel 4.13 dan 4.14).

Dominasi luas lantai per kapita sebagai prediktor terkuat kesejahteraan (beta = 0,288) memiliki implikasi kebijakan yang penting. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi dalam perbaikan kualitas perumahan, bukan hanya bantuan tunai, dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan multidimensional (UN-Habitat, 2016). Program seperti *Program Rutilahu* (Rumah Tidak Layak Huni) yang memberikan bantuan perbaikan rumah untuk keluarga miskin perlu diperluas cakupannya dan diintegrasikan dengan PKH untuk dampak optimal (World Bank, 2020).

Dalam konteks DTSEN, kondisi perumahan merupakan salah satu dimensi dengan bobot tertinggi dalam perhitungan skor kesejahteraan karena mencerminkan akumulasi kapasitas ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang (Kemensos RI, 2025; Suryahadi et al., 2024). Hasil penelitian ini memvalidasi desain sistem DTSEN yang memberikan penekanan kuat pada dimensi perumahan dalam pengukuran kesejahteraan multidimensional.

Pembahasan Rumusan Masalah 5: Pengaruh Akses Layanan Dasar dan Infrastruktur terhadap Skor Kesejahteraan DTSEN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator akses layanan dasar dan infrastruktur, yaitu jarak ke fasilitas kesehatan, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap skor kesejahteraan DTSEN.

Temuan ini sangat konsisten dengan literatur tentang pentingnya akses geografis terhadap layanan kesehatan yang dikemukakan oleh Ensor dan Cooper (2004) serta Feikin et al. (2009). Jarak yang jauh meningkatkan biaya transaksi dalam bentuk waktu dan biaya transportasi yang mengurangi utilisasi layanan kesehatan, terutama untuk pemeriksaan preventif dan pengobatan dini (Rokx et al., 2010). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa setiap kilometer tambahan jarak ke fasilitas kesehatan mengurangi probabilitas utilisasi sebesar 3-5% (Rokx et al., 2010).

Mekanisme pengaruh jarak ke fasilitas kesehatan terhadap kesejahteraan adalah melalui: (1) Kesehatan**:** Akses yang terbatas mengurangi utilisasi layanan preventif (imunisasi, pemeriksaan kehamilan) dan pengobatan dini, yang berdampak pada status kesehatan yang lebih buruk (Ensor & Cooper, 2004); (2) Produktivitas**:** Kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas kerja dan produktivitas, serta meningkatkan hari kerja yang hilang (Feikin et al., 2009); (3) **Pengeluaran Katastropik**: Keterlambatan pengobatan dapat menyebabkan penyakit menjadi lebih serius, yang memerlukan biaya pengobatan besar dan dapat mendorong rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan lebih dalam (*medical poverty trap*) (World Bank, 2020).

Fakta bahwa 74,5% KPM PKH harus menempuh jarak lebih dari 1 km untuk mengakses fasilitas kesehatan (dengan 25,5% bahkan harus menempuh > 3 km) mencerminkan keterbatasan infrastruktur kesehatan di wilayah pedesaan. Kondisi ini diperburuk oleh kualitas akses jalan yang buruk (66,0% memiliki kondisi jalan aspal rusak atau tanah/berbatu), yang semakin meningkatkan biaya transaksi untuk mengakses layanan kesehatan (Jacoby, 2000). Meskipun variabel infrastruktur jalan tidak dimasukkan sebagai variabel terpisah dalam model akhir penelitian ini (untuk menghindari multikolinearitas dengan jarak ke fasilitas kesehatan), hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kondisi jalan yang buruk merupakan masalah serius di Desa Simpang Dolok. Penelitian Jacoby (2000) dan Dercon et al. (2009) menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur jalan mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga melalui pengurangan biaya transportasi, peningkatan integrasi pasar, fasilitasi difusi informasi dan teknologi, serta peningkatan nilai aset properti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaruh Karakteristik Demografi Kepala Rumah Tangga
   Dari tiga indikator karakteristik demografi kepala rumah tangga yang diuji, dua variabel berpengaruh signifikan terhadap skor kesejahteraan DTSEN:
   a. Pendidikan KRT berpengaruh positif dan signifikan (β = 1,156; t = 3,568; sig. 0,001 < 0,05). Setiap peningkatan satu tingkat pendidikan meningkatkan skor kesejahteraan sebesar 1,156 poin. Temuan ini mengkonfirmasi teori *human capital* yang menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas, akses terhadap pekerjaan berkualitas, dan kemampuan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik (Becker, 1993; Schultz, 1961; Todaro & Smith, 2020).
   b. Jenis Kelamin KRT berpengaruh negatif dan signifikan (β = -1,234; t = -2,276; sig. 0,026 < 0,05). Rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki skor kesejahteraan 1,234 poin lebih rendah, mengkonfirmasi kerentanan spesifik *female-headed households* seperti diskriminasi di pasar tenaga kerja, *gender wage gap*, dan akses terbatas terhadap aset produktif (Buvinic & Gupta, 1997; Chant, 2008).
   c. Usia KRT tidak berpengaruh signifikan (sig. 0,138 > 0,05), kemungkinan karena mayoritas KRT berada pada rentang usia produktif sehingga variasi usia tidak cukup besar untuk menunjukkan perbedaan kesejahteraan yang signifikan (Field, 2018).

2. Pengaruh Karakteristik Keluarga
   Kedua indikator karakteristik keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap skor kesejahteraan DTSEN:
   a. Jumlah Anggota Rumah Tangga berpengaruh negatif dan signifikan (β = -0,682; t = -3,187; sig. 0,002 < 0,05). Setiap penambahan satu anggota rumah tangga menurunkan skor kesejahteraan sebesar 0,682 poin, mengkonfirmasi teori *dilution effect* yang menyatakan bahwa penambahan anggota rumah tangga menyebabkan dilusi sumber daya per kapita (Lanjouw & Ravallion, 1995; Deaton & Paxson, 1998).
   b. Rasio Ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan (β = -1,524; t = -2,352; sig. 0,021 < 0,05). Setiap peningkatan rasio ketergantungan sebesar 1 unit menurunkan skor kesejahteraan sebesar 1,524 poin, mendukung teori *demographic dividend* yang menekankan pentingnya struktur usia produktif yang tinggi (Bloom & Williamson, 1998; World Bank, 2020).

3. **Pengaruh Kondisi Ekonomi Rumah Tangga**
   Kelima indikator kondisi ekonomi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor kesejahteraan DTSEN:
   a. Status Pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan (β = 2,148; t = 2,452; sig. 0,016 < 0,05). KRT yang bekerja memiliki skor kesejahteraan 2,148 poin lebih tinggi, mengkonfirmasi bahwa pekerjaan merupakan sumber pendapatan fundamental (Fields, 2011; ILO, 2018).
   b. Jenis Pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,845; t = 2,051; sig. 0,044 < 0,05). Perpindahan dari pekerjaan pertanian ke non-pertanian atau dari informal ke formal meningkatkan skor kesejahteraan, mendukung literatur tentang pentingnya *livelihood diversification* (Ellis, 2000; Barrett et al., 2001).
   c. Kepemilikan Lahan berpengaruh positif dan signifikan (β = 1,423; t = 2,505; sig. 0,014 < 0,05). Rumah tangga yang memiliki lahan memiliki skor kesejahteraan 1,423 poin lebih tinggi, mengkonfirmasi pentingnya lahan sebagai aset produktif fundamental di wilayah pedesaan (Deininger & Feder, 2001; Besley, 1995).
   d. Luas Lahan berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,0008; t = 2,667; sig. 0,009 < 0,05). Setiap penambahan 1000 m² (0,1 ha) meningkatkan skor kesejahteraan sebesar 0,8 poin, mengkonfirmasi hubungan positif antara luas lahan dengan produksi dan pendapatan pertanian (Feder & Feeny, 1991).
   e. Kepemilikan Ternak berpengaruh positif dan signifikan (β = 1,287; t = 2,456; sig. 0,016 < 0,05). Rumah tangga yang memiliki ternak memiliki skor kesejahteraan 1,287 poin lebih tinggi, mengkonfirmasi fungsi ternak sebagai *living savings* dan sumber pendapatan tambahan (Ellis, 2000; Scoones, 1998).

Saran

1. Tingkat Nasional (Kementerian Sosial)
   Secara nasional, peningkatan efektivitas PKH memerlukan pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan. Penguatan peran pendamping melalui modul yang lebih komprehensif, pemutakhiran DTSEN yang partisipatif dan adaptif, serta penerapan mekanisme graduasi bertahap berbasis skor kesejahteraan menjadi kunci untuk mencegah ketergantungan bantuan dan kemiskinan berulang.
2. Tingkat Provinsi (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)
   Pada tingkat provinsi, sinergi lintas sektor menjadi prasyarat utama keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Koordinasi antar-SKPD dan dukungan anggaran untuk program komplementer PKH diperlukan agar intervensi sosial tidak berjalan parsial, melainkan saling memperkuat dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin.
3. Tingkat Kabupaten (Pemerintah Kabupaten Batu Bara)
   Di tingkat kabupaten, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada dimensi yang terbukti paling berpengaruh terhadap kesejahteraan, yaitu kualitas perumahan, pendidikan, kepemilikan aset produktif, dan infrastruktur dasar. Reorientasi SPKD, penguatan program perbaikan rumah, perluasan akses pendidikan melalui beasiswa, serta percepatan pembangunan jalan desa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima PKH secara berkelanjutan.
4. Tingkat Desa (Pemerintah Desa Simpang Dolok)
   Pada tingkat desa, optimalisasi Dana Desa dan penguatan kelembagaan lokal menjadi instrumen utama penanggulangan kemiskinan. Alokasi anggaran yang fokus pada determinan kesejahteraan, pengembangan BUMDes yang inklusif bagi KPM PKH, serta pelaksanaan musyawarah desa secara partisipatif diperlukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., & Tobias, J. (2012). Targeting the poor: Evidence from a field experiment in Indonesia. American Economic Review, 102(4), 1206-1240. https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1206

Alkire, S. (2002). Valuing freedoms: Sen's capability approach and poverty reduction. Oxford University Press.

Alkire, S., & Deneulin, S. (2009). The human development and capability approach. In S. Deneulin & L. Shahani (Eds.), An introduction to the human development and capability approach: Freedom and agency (pp. 22-48). Earthscan.

Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95(7-8), 476-487. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006

Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring acute poverty in the developing world: Robustness and scope of the Multidimensional Poverty Index. World Development, 59, 251-274. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026

Ashley, C., & Carney, D. (1999). Sustainable livelihoods: Lessons from early experience. Department for International Development.

Atkinson, A. B. (1970). On the measurement of inequality. Journal of Economic Theory, 2(3), 244-263. https://doi.org/10.1016/0022-0531(70)90039-6

Babbie, E. (2016). The practice of social research (14th ed.). Cengage Learning.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kementerian PPN/Bappenas.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & UNICEF. (2021). Multidimensional poverty in Indonesia: Beyond monetary measures. Bappenas & UNICEF Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2015). Pedoman pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2024). Profil kemiskinan di Indonesia September 2024. BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara. (2024). Kabupaten Batu Bara dalam angka 2024. BPS Kabupaten Batu Bara.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). Provinsi Sumatera Utara dalam angka 2024. BPS Provinsi Sumatera Utara.

Fadlan, A., Faried, A. I., & Dinanti, D. (2024). EDUKASI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA SEI ROTAN, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Pemberdayaan Sosial Dan Teknologi Masyarakat*, *4*(2), 136-143.

Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (5th ed.). SAGE Publications.

Fields, G. S. (2011). Labor market analysis for developing countries. Labour Economics, 18(Supplement 1), S16-S22. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2011.09.005

Fiszbein, A., & Schady, N. (2009). Conditional cash transfers: Reducing present and future poverty. World Bank.

Fleurbaey, M. (2009). Beyond GDP: The quest for a measure of social welfare. Journal of Economic Literature, 47(4), 1029-1075. https://doi.org/10.1257/jel.47.4.1029

Galster, G. C. (1987). Homeowners and neighborhood reinvestment. Duke University Press.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate data analysis (8th ed.). Cengage Learning.

Hasanah, U., Faried, A. I., & Monika, S. (2024). Persepsi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat Tani Di Desa Nageri Kecamatan Juhar kabupaten Karo. *Senashtek 2024*, *2*(1), 64-70.

Hasanah, U., Faried, A. I., & Sembiring, R. (2023). The Role Of Women's Labor Force Participation In Decreasing Aceh Province Poverty Rate.

Nussbaum, M. C. (2000). Women and human development: The capabilities approach. Cambridge University Press.

Ravallion, M. (2016). The economics of poverty: History, measurement, and policy. Oxford University Press.

Ravallion, M., & Wodon, Q. (1999). Poor areas, or only poor people? Journal of Regional Science, 39(4), 689-711. https://doi.org/10.1111/0022-4146.00156

Rawlings, L. B., & Rubio, G. M. (2005). Evaluating the impact of conditional cash transfer programs. The World Bank Research Observer, 20(1), 29-55. https://doi.org/10.1093/wbro/lki001

Sembiring, R., Yusuf, M., Irawan, I., & Faried, A. I. (2023). Structural Equation Modelling: Pembangunan Desa Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *23*(2).

Sembiring, R., Faried, A. I., & Hasanah, U. (2022, September). Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Desa Kabupaten Simalungu. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 568-576).